

PENGARUH *PERSONAL BACKGROUND*, *POLITICAL BACKGROUND* DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS DI KARESIDENAN SURAKARTA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006)

**JAKA WINARNA
SRI MURNI**

Universitas Sebelas Maret

Jakaning2003@yahoo.com

This research aims to examine the influence of personal background, political background, and council budget knowledge towards the role of DPRD on region financial control. This research is motivated by the fact that individual background will effect to individual behavior on political activity. Dependent variables in this research are personal background, political background, and council budget knowledge towards the role of DPRD on region financial control. Independent variable is the role of DPRD on region financial control in planning, implementing, and responsibility steps. The data in this research consist of primary data that taken from questionnaires distributed directly to respondents. The collected are from 85 respondents that Financial Commission and Budget Committee members of DPRD at ex Surakarta Residence and Yogyakarta. Hypothesis of this research are tested by using Multivariate Analysis of Variances (MA-NOVA). The result of this research in general shows that personal back-ground, and political background have no significant influence towards the role of DPRD on region financial control. But the council budget know-ledge have significant influence towards the role of DPRD on region finan-cial control.

Keywords: personal background, political background, council budget knowledge, the role of DPRD, and region financial control.

PENDAHULUAN

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Namun demikian setelah lima tahun era otonomi tersebut, pada setiap awal tahun anggaran masih terdapat sejumlah isu yang berkaitan dengan perencanaan anggaran pemerintah daerah. Sebagai contoh pada RAPBD salah satu Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, dana untuk kepentingan pejabat sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan dana untuk masyarakat (Jawa Pos, Januari 2006). Dalam RAPBD tersebut dana untuk membuat papan nama wali kota mencapai 200 juta rupiah. Pembangunan kamar ajudan di rumah dinas dianggarkan 68 juta rupiah lebih, pembelian tempat tidur untuk wali kota 33 juta rupiah dan membeli lemari pakaian 35 juta rupiah. Sementara itu dana untuk orang cacat dan terlantar hanya 100 juta rupiah, dana untuk penanggulangan HIV AIDS 30 juta rupiah, dan dana antisipasi keadaan luar biasa bidang kesehatan 44 juta rupiah.

Hal yang sangat kritis pada tahap perencanaan anggaran tersebut adalah perlunya penguatan pada sisi pengawasan. DPRD merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Pemerintah Daerah) sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah (di pusat) dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna (Makeuda, 1981 dalam Witono, 2003).

Berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas, maka jelas peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang sangat strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif. Hal ini berakibat program kerja yang ada dalam anggaran daerah belum sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. Program kerja tersebut cenderung merupakan arahan dari pemerintah atasan, yaitu pemerintah pusat dan/atau pemda propinsi.

Permasalahan tersebut apabila dikaji berdasarkan pandangan Sastroatmodjo (1995) ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.

Dalam pendekatan behaviorisme, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga.

Syahrudin dan Taifur (2001) menyatakan bahwa kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsinya tidak saja ditentukan oleh kualitas anggota DPRD yang ada, tetapi dipengaruhi pula oleh perilaku (moral) anggota DPRD. La Palombara (1974) menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif, yaitu institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai & ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih. Sedangkan Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan perannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Studi yang dilakukan Murni dan Witono (2003) yang meneliti pengaruh *personal background* dan *political background* terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menunjukkan bahwa strata pendidikan, latar belakang pekerjaan dan asal parpol berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan jenis kelamin, usia, bidang pendidikan, pengalaman politik, pengalaman di DPRD, ideologi parpol, dan asal komisi tidak berpengaruh secara signifikan. Indriani (2002) meneliti pengaruh pengetahuan dan RPPs terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Masih belum konsistennya hasil penelitian sebelumnya dan masih terbatasnya penelitian di bidang sektor publik memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini berusaha menggabungkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Murni dan Witono (2004) dan Indriani (2002). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal obyek dan lingkup penelitiannya. Penelitian Murni dan Witono (2004) hanya menggunakan DPRD wilayah se-Eks Karesidenan Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini selain DPRD se-Eks Karesidenan Surakarta ditambah dengan DPRD se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini juga menambahkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran sebagaimana penelitian Indriani (2002). Dengan perluasan area survei dan obyek penelitian yang berbeda diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya serta dapat diketahui pengaruh

personal background, political background dan pengetahuan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada anggota DPRD dalam menjalankan perannya sebagai pengawas keuangan daerah dan peneliti yang akan datang yang akan melakukan penelitian di bidang akuntansi sektor publik.

PENELITIAN TERDAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Personal Background

Ada dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu (Sastroatmodjo 1995). Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah dapat mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik.

Dalam pendekatan *behaviorime*, individu yang dipandang secara aktual melakukan kegiatan politik, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya merupakan perilaku individu dengan pola tertentu. Oleh karena itu untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga (Surbakti 1992).

Menurut Sastroatmodjo (1995) perilaku politik aktor politik seperti perencanaan, pengambilan keputusan dan penegakan keputusan dipengaruhi oleh berbagai dimensi latar belakang yang merupakan bahan dalam pertimbangan politiknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik ada empat (Surbakti 1992), yaitu:

- a. Faktor lingkungan sosial politik tak langsung, seperti seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- b. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, tingkat pendidikan, kelompok pergaulan dan pengalaman pribadi
- c. Faktor struktur kepribadian individu yang tercermin dalam sikap individu, yang didasarkan pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi diri dan pertahanan diri.
- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor politik secara langsung ketika melakukan kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan ruang, susunan kelompok dan ancaman dengan segala bentuknya.

Lebih jauh Sastroatmodjo (1995) menyatakan bahwa karakteristik sosial seperti status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis, usia, jenis kelamin dan agama termasuk faktor-faktor yang akan mempengaruhi perilaku politik seseorang. Status sosial baik disebabkan oleh tingkat pendidikan maupun pekerjaan, memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas dari pada seseorang yang berada dalam status sosial di bawahnya. Dengan status sosial yang tinggi diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik serta sikap dan kepercayaan yang tinggi pada pemerintah.

Selanjutnya, Sastroatmodjo juga menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dalam karakteristik dan tingkah laku politik. Usia mempengaruhi

tingkat kematangan berfikir dan dalam pengambilan keputusan. Kelompok ras atau etnis memiliki watak kolektif yang berbeda, sehingga memberikan warna pada perilaku politiknya.

La Palombara (1974) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif meliputi institusi politik, partai politik, karakteristik personal (latar belakang, sosialisasi, nilai dan ideologi), pengalaman politik dan sifat pemilih.

Truman (1960) berpendapat bahwa semua politisi baik seorang legislatif, eksekutif maupun yudikatif baik yang terpilih maupun yang diangkat, diberi wewenang untuk membuat keputusan yang dipandu oleh partai dengan menggunakan pengetahuan yang relevan. Sejalan dengan pendapat Truman, Waterfield (1955) juga menyatakan bahwa seorang anggota parlemen yang memiliki pengetahuan bekerja yang baik atas praktek-praktek parlementari akan dapat berpartisipasi secara efektif dalam cara kerja legislatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman anggota legislatif atau dewan akan mempengaruhi tingkat partisipasi dan peranannya dalam parlemen. Yudoyono (2000) menyatakan bahwa tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Personal Background* mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Political Background

La Palombara (1974) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan peran legislatif diantaranya adalah latar belakang partai politik. Partai politik (*political party*) biasanya mengacu pada suatu organisasi yang memobilisasi para pemilih atau pemilik suara (*voter*) dengan mengatasmakan suatu kepentingan-kepentingan atau ideologi-ideologi tertentu (Stiftung 2001). Peran utama partai politik dalam lembaga legislatif pada dasarnya adalah mempertajam hubungan antara badan eksekutif dan legislatif .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Persson et al. (2000) menunjukkan bahwa *political regime* (*presidential-congressional regime* dan *parliamentary regime*) berhubungan dengan *policy outcome*. Di samping itu juga berpengaruh terhadap besar maupun komposisi *government spending*. Penelitian lain yang memasukkan variabel partai politik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, misalnya penelitian mengenai pengaruh partai politik terhadap kebijakan pemerintah yang dilakukan di Inggris. Hasil penelitian umumnya menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian Gilligan dan Matsusaka (1995) juga menunjukkan bukti bahwa partai politik mempengaruhi komposisi pengeluaran.

Sementara itu, hasil penelitian Carmines menunjukkan adanya hubungan antara tingkat kompetisi partai dengan kebijakan *welfare*. Sedangkan penelitian Ibrahim (1994) menunjukkan bahwa ada perbedaan *local authority's spending* antara tiga partai yang berkuasa di Inggris (*Labour*, *Conservative* dan *non-majority control*). Perbedaan *spending* ini disebabkan oleh perbedaan ideologi politik dari masing-masing partai.

Sementara itu, Yudoyono (2000) menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai, karena bagaimanapun pengalaman akan sangat menentukan tingkat kematangan anggota DPRD dalam berpolitik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa posisi dalam *status hierarchy* mempengaruhi partisipasi dalam melakukan aktivitas (Lucas 1999). Menurut Krafchik dan Wehner (1999), kemampuan parlemen untuk mengubah anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan komisi (*committee*) dalam *legislative process*. Di banyak negara, Komisi Keuangan (*Finance Committee*) berperan dalam *Budget process*. Di Jerman misalnya, Komisi Anggaran bahkan melaksanakan tugas untuk mengotorisasi anggaran dan melakukan *monitoring implementasi* anggaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Political background* berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Pengetahuan Tentang Anggaran

Conner dan Prahald (1996) dan Grant dalam Griffith *et al.* (1999) menyebutkan bahwa pengetahuan merupakan sumberdaya yang penting bagi organisasi. Guerrero (2001) menyebutkan bahwa legislatif tidak memiliki lembaga asistensi yang khusus pada isu-isu anggaran dan yang mendukung aktivitas harian mereka; sehingga penilaian, pendapat, dan hasil RAPBN terbatas pada pengetahuan legeslatif. Pada laporan studi lapangan di Kota Makassar (2000) menyebutkan Dewan harus memiliki pengetahuan luas dan persepsi tentang isu-isu lokal. Selanjutnya Yudoyono menyatakan bahwa DPRD mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional, hanya dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan saja piawai dalam berpolitik melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, mekanisme kerja kelegeslatifan, kebijakan publik, teknik pengawasan, penyusunan anggaran dan lain sebagainya.

Dari uraian di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Pengetahuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai anggaran berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

METODOLOGI

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD se-eks Karisidenan Surakarta yang meliputi 7 Kabupaten yaitu Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali dan Kota Surakarta dan Kabupaten/Kota se-Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi 5 Kabupaten yaitu: Kabupaten Sle-

man, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama adalah memilih anggota dewan dari 12 Kabupaten tersebut yang berasal dari Komisi Keuangan dan atau Panitia Anggaran. Jumlah anggota dewan dari yang berasal dari Komisi Keuangan dan atau Panitia Anggaran adalah sekitar 25 orang untuk setiap kabupaten. Sehingga pada tahap pertama akan terkumpul daftar sekitar 300 orang anggota Dewan. Pada tahap kedua dengan menggunakan metode *Simple Random Sampling* dipilih 150 orang anggota dewan. Metode penyebaran kuesioner adalah *Personally Administered Questionnaires*, yaitu penggunaan kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden. Peneliti berhasil menemui 85 responden (56,67%) secara langsung untuk mengisi kuesioner dari 150 responden yang ditargetkan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sedangkan variabel independennya terdiri dari *personal background*, *political background*, dan pengetahuan dewan tentang anggaran.

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dalam penelitian ini adalah digunakannya hak-hak DPRD baik dalam perencanaan, pelaksanaan (implementasi), maupun pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebagai-mana pentahapan anggaran yang dibuat Henley *et al.* (1992), Bingham *et al.* (1991), Permen-dagri No. 13 Tahun 2006, dan Murni dan Witono (2002). Variabel peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan skala kategori (*Category Scale*). Skala kategori adalah metode pengukuran yang berisi beberapa alternatif kategori pendapat yang memungkinkan bagi responden untuk memberi alternatif penilaian (Indriantoro dan Supomo 1999) yang sesuai dengan sikap dan tindakan yang dilakukan atas pertanyaan yang diajukan. Pengukuran variabel dengan skala 1 sampai dengan 5. Skala 1) tidak pernah, 2) Jarang, 3) kadang-kadang, 4) sering dan 5) selalu.

Personal Background

Variabel *personal background* ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal, kecuali usia yang diukur berdasarkan skala rasio. Variabel *personal background* ini didasarkan dari beberapa studi yang dilakukan oleh La Palombara (1974), Dewey dan Humber (1951), Truman (1960), Surbakti (1977, 1992), Sunarto (1979), Sastroatmodjo (1995), Yudoyono (2000) serta Murni dan Witono (2002).

Political Background

Variabel *political background* ini meliputi beberapa dimensi, yaitu: pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan asal komisi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala nominal atau kategorikal, kecuali pengalaman politik dan pengalaman di DPRD yang diukur dengan skala rasio, yaitu berupa lama tahun. Variabel ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh David M Farrell dan Ian McAllister (1995), serta Murni dan Witono (2002).

Pengetahuan dewan tentang Anggaran

Pengetahuan merupakan persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Variabel pengetahuan diukur dengan menggunakan skala likert dari tidak pernah ke selalu dengan rentang nilai antara 1 sampai dengan 5. (Indriani 2002, dan Sopanah 2003).

Pengujian Kualitas Data

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan alat ukur dalam mengukur objek yang diteliti. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk (*construct validity*), karena validitas konstruk memiliki pendekatan yang cukup objektif dan sederhana, selain itu validitas konstruk juga cukup banyak digunakan dalam penelitian sosial. Pada pengujian validitas ini menggunakan analisis korelasional untuk mendapatkan validitas konstruk yaitu, dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan dalam kuesioner.

Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *coefficient cronbach's alpha*. *Cronbach's alpha* merupakan teknik pengujian konsistensi reliabilitas antar item yang paling populer dan menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna, semakin tinggi koefisien alpha, berarti semakin baik pengukuran suatu instrumen (Sekaran 2000:206).

Uji normalitas dilakukan karena salah satu asumsi yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan tes parametrik adalah pengamatan harus dilakukan pada populasi yang terdistribusi normal. Uji normalitas yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *Kolmogorov-Smirnov* yang terdapat pada program komputer SPSS 12. Tujuan dari uji ini adalah membuktikan bahwa sampel telah diambil secara acak dari populasinya dan variabel yang diteliti memenuhi kriteria distribusi normal. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi dari uji normalitas ini haruslah sebesar 0,05. Artinya jika nilai $Sig_{hit} > 0,05$ maka distribusi adalah normal (asimetris).

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multivariate Analysis of Variance* (MANOVA), dengan bantuan SPSS 12.0. Manova digunakan untuk menguji perbedaan nilai rata-rata antar group dalam dua atau lebih variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen yang diukur dengan skala no-

minal (Indriantoro dan Supomo 1999). Adapun model persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_1 + Y_2 + Y_3 = X_1 + X_2 + X_3$$

Keterangan:

Y_1 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Perencanaan

Y_2 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Implementasi

Y_3 = Peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap Pertanggungjawaban

X_1 = *Personal Background*

X_2 = *Political Background*

X_3 = Pengetahuan tentang Anggaran

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengumpulan Data

Hasil penyebaran kuesioner untuk masing-masing daerah disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 1
Kabupaten/Kota Asal Responden

Kabupaten/Kota	Jumlah	Prosentase
Wonogiri	10	11,8%
Sukoharjo	7	8,2%
Surakarta	5	5,9%
Karanganyar	12	14,2%
Sragen	9	10,6%
Boyolali	8	9,4%
Klaten	9	10,6%
Yogyakarta	7	8,2%
Sleman	4	4,7%
Kulon Progo	7	8,2%
Gunung Kidul	7	8,2%
Total	85	100.0%

Sumber: data output SPSS diolah

Berdasarkan hasil pengolahan data mengenai demografi responden disajikan dalam tabel berikut ini:

TABEL 2
Data Demografi Responden

	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin	Laki	77	90,6%
	Perempuan	8	9,4%
Usia	20 - 29 tahun	2	2,3%
	30 - 39 tahun	31	36,5%
	40 - 49 tahun	34	40,0%
	50 - 59 tahun	14	16,5%
	60 - 69 tahun	4	4,7%
Pendidikan	SMU/SMK/SLTA	23	27,1%
	Diploma 3 (D3)	11	12,9%
	Strata 1 (S1)	45	52,9%
	Strata 2 (S2)	6	7,1%
Bidang Pendidikan	Ilmu sosial dan politik	14	16,5%
	Teknik	11	12,9%
	Ilmu agama	6	7,0%
	Akuntansi	5	5,9%
	Manajemen	12	14,1%
	Hukum	10	11,8%
	Lainnya	27	31,8%
Pekerjaan	Wiraswasta	42	49,4%
	Karyawan swasta	36	42,4%
	Pegawai negeri sipil	7	8,2%
Asal Komisi	Komisi A	15	17,6 %
	Komisi B	36	42,4 %
	Komisi C	18	21,2 %
	Komisi D	10	11,8 %
	Unsur Pimpinan	6	7,2 %
Ideologi Partai	Nasionalis	47	55,3 %
	Nasionalis Agama	11	12,9 %
	Agama	18	21,2 %
	Demokrat	9	10,6 %
Pengalaman Di DPRD	1 periode	55	64,7 %
	2 periode	21	24,7 %
	3 periode	9	10,6 %
Pengalaman politik	1 – 10 tahun	9	10,6 %
	11 – 20 tahun	50	58,8 %
	21 – 30 tahun	17	20 %
	31 – 40 tahun	9	10,6 %

Analisis Data

Pengujian Kualitas Data

Hasil pengujian validitas dengan metode *Pearson Correlation* menunjukkan bahwa dari semua pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian mempunyai reliabilitas sedang dan sangat tinggi dengan nilai alpha 0,754 untuk variabel perencanaan, 0,754 untuk variabel implementasi, 0,930 untuk variabel pertanggungjawaban, dan 0,965 untuk variabel pengetahuan tentang anggaran.

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran data adalah normal. Nilai Asymp.Sig (2 tailed) adalah 0,669 untuk variabel perencanaan, 0,194 untuk variabel implementasi, 0,195 untuk variabel pertanggungjawaban, dan 0,159 untuk variabel pengetahuan tentang anggaran.

Pengujian Hipotesis

Salah satu bagian dari "uji multivariat" adalah menguji secara serempak (*simultaneously*) efek dari setiap faktor terhadap kelompok dependen yang merupakan hal yang sangat penting dalam analisis MANOVA. Tiap-tiap faktor yaitu jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan dalam penelitian ini mempunyai efek utama. Pengolahan data dengan program SPSS juga memberikan empat alternatif uji signifikansi multivariat, yaitu Pillai's Trace, Wilk's Lambda, Hotelling's Trace, dan Roy's Largest Root. Menurut Hair *et al.* (1998) bahwa diantara ketiga prosedur dalam MANOVA tersebut, hasil estimasi Roy's Largest Root termasuk paling baik. Berikut disajikan tabel hasil tes multivariat terhadap variabel-variabel tersebut.

TABEL 3
Multivariate Tests

Effect		Sig.
Jenis kelamin	Roy's Largest Root	0,954
Usia	Roy's Largest Root	0,334
Strata pendidikan	Roy's Largest Root	0,008
Bidang pendidikan	Roy's Largest Root	0,370
Latar belakang pekerjaan	Roy's Largest Root	0,593
Pengalaman di DPRD	Roy's Largest Root	0,585
Pengalaman Politik	Roy's Largest Root	0,289
Asal Parpol	Roy's Largest Root	0,001
Ideologi Parpol	Roy's Largest Root	1,000
Asal Komisi	Roy's Largest Root	0,017
Pengetahuan Anggaran	Roy's Largest Root	0,000

Sumber: data output SPSS diolah

Dalam uji tersebut terlihat bahwa variabel *personal background* yang terdiri dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan, hanya strata pendidikan saja yang memiliki nilai signifikansi 0,008 (atau di bawah 0,005) yang berarti menerima H_1 atau strata pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Pada variabel *political background* yang terdiri dari pengalaman di DPRD, pengalaman politik, asal parpol, ideologi parpol, dan asal partai, hanya asal parpol dan asal komisi saja yang memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 (0,001 dan 0,017) yang berarti bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan variabel pengetahuan dewan tentang anggaran juga memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signifikansi 0,000 atau dibawah 0,05.

Dalam uji multivariat oleh MANOVA juga dapat dihasilkan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen secara individu. Hasil uji tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 4
Tests of Between-Subjects Effects

Source	Dependent Variabel	Sig.
Jenis kelamin	Implementasi	0,680
	Pertanggungjawaban	0,970
	Perencanaan	0,647
Usia	Implementasi	0,481
	Pertanggungjawaban	0,436
	Perencanaan	0,826
Strata pendidikan	Implementasi	0,072
	Pertanggungjawaban	0,839
	Perencanaan	0,019
Bidang pendidikan	Implementasi	0,475
	Pertanggungjawaban	0,707
	Perencanaan	0,438
Latar belakang pekerjaan	Implementasi	0,805
	Pertanggungjawaban	0,390
	Perencanaan	0,937
Pengetahuan Anggaran	Perencanaan	0,033
	Implementasi	0,140
	Pertanggungjawaban	0,000
Pengalaman di DPRD	Perencanaan	0,822
	Implementasi	0,555
	Pertanggungjawaban	0,772
Pengalaman politik	Perencanaan	0,782
	Implementasi	0,210
	Pertanggungjawaban	0,986

Asal Parpol	Perencanaan	0,012
	Implementasi	0,803
	Pertanggungjawaban	0,858
Ideologi Parpol	Perencanaan	1,0
	Implementasi	1,0
	Pertanggungjawaban	1,0
Asal Komisi	Perencanaan	0,128
	Implementasi	0,237
	Pertanggungjawaban	0,032

Sumber: data output SPSS diolah

Secara individu dapat dijelaskan bahwa variabel strata pendidikan Secara individu dapat dijelaskan bahwa variabel strata pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan karena nilai signifikansi yaitu 0,019 atau dibawah 0,05. Variabel pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban (0,033 dan 0,000). Asal parpol berpengaruh signifikan pada tahap perencanaan (0,012) dan asal komisi berpengaruh signifikan pada tahap pertanggungjawaban (0,032). Sedangkan untuk variabel lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan pada peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah baik pada tahap perencanaan, implementasi maupun pertanggungjawaban.

Pembahasan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara umum menerima H_3 dan menolak H_1 dan H_2 . Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawanan keuangan daerah. Sedangkan *personal background* dan *political background* secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Hal ini sependapat dengan penelitian Murni dan Witono (2004) yang menyatakan *political background* dan *personal background* secara umum tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tidak berpengaruhnya kedua variabel tersebut mungkin dikarenakan konsekuensi tugas yang mengharuskan anggota dewan dari Komisi Keuangan dan Panitia Anggaran membahas dan mengawasi jalannya pengelolaan APBD. Dimana untuk meningkatkan kemampuannya seorang anggota dewan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah demi meningkatkan kualifikasi yang optimal.

Indriani (2002) berpendapat sama dengan penelitian ini, yang menyimpulkan bahwa pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh anggota Dewan begitu juga dengan penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan pengetahuan Dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah baik menurut sampel anggota Dewan maupun masyarakat.

Merujuk Indriantoro dan Supomo (1999) bahwa pengetahuan diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang lebih baik apabila didukung pendidikan dan pengalaman yang memadai di bidang tugasnya. Pengetahuan anggaran juga dapat ditingkatkan melalui seminar-seminar, workshop-workshop, serta pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2002) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan yang didasarkan pada tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini sejalan juga dengan Indri (2001), Syamsiar (2001), dan Sutamoto (2002) dalam Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang menyatakan bahwa kualitas Dewan yang diukur dengan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja dewan salah satunya adalah kinerja pada saat melakukan fungsi pengawasan. Serta Yudoyono (2000) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap peran dan kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Tingkat pendidikan seorang aktor politik akan berpengaruh terhadap kemampuan memahami permasalahan baik secara teknis maupun non-teknis. Semakin tinggi pendidikan seorang politikus maka semakin baik pula kecakapan berpoliticnya.

Untuk pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran secara individu terhadap tahap-tahap pengawasan keuangan daerah hanya berpengaruh pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini mungkin dikarenakan pada tahap perencanaan anggota Dewan mempunyai peranan penting dalam memberikan legitimasi tentang RAPBD yang telah disusun. Dalam pemberian legitimasi tersebut pengawasan keuangan daerah dilakukan secara langsung. Anggota Dewan dapat mengetahui rencana anggaran yang diajukan apakah relevan atau tidak. Pada tahap pertanggungjawaban pengetahuan Dewan tentang anggaran secara langsung dapat mendeteksi adanya suatu kebocoran dan pemborosan anggaran yang terjadi dengan melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban, laporan perhitungan APBD, dan Nota perhitungan APBD.

Sedangkan pengaruh pengetahuan Dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap implementasi tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan pengawasan yang dilakukan hanya bersifat pengamatan dan mempelajari pendapat masyarakat. Dewan hanya memastikan apakah APBD yang ditetapkan telah dijalankan dengan baik.

Menurut Marbun (1982) ketidaksempurnaan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan disebabkan karena minimnya pengetahuan dasar dan pengetahuan teknis yang dimiliki oleh rata-rata anggota DPRD dibandingkan dengan pihak eksekutif dan adanya perasaan cepat puas yang dimiliki oleh anggota DPRD. Akibatnya Dewan jarang melakukan peninjauan dilapangan. Biasanya dalam peninjauan tersebut DPRD dapat mengikuti perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif dan Dewan dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan atau sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik kepada aparat alat pemerintahan daerah.

Demi mencapai tingkat fungsional yang memadai maka setiap anggota DPRD harus membenahi diri dan mengkaji ulang posisi dan peranannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu., demi meningkatkan citra DPRD dimasyarakat maka DPRD dituntut untuk bekerja lebih keras dan mempunyai keluaran (output) baik kualitatif maupun kuantitatif memenuhi persyaratan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini mendapatkan bukti empiris bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawalan keuangan daerah. Sedangkan *personal background* dan *political background* secara umum tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Analisis MANOVA juga memperlihatkan bahwa variabel independen *personal background* dan *political background* secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Namun variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah pada tahap perencanaan dan pertanggungjawaban.

Saran

Saran yang peneliti ajukan untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas jangkauan pengamatan dari segi wilayah pengamatan untuk mendapatkan sampel yang lebih banyak sehingga penelitian ini dapat digeneralisasikan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel *personal background* seperti jabatan di dewan, pengalaman organisasi, lama masa kerja di pemerintahan, tingkat penghasilan, etnis atau ras, dan agama. Variabel *political background* bisa ditambah dengan jabatan di partai politik, jumlah partai politik yang pernah diikuti dan daerah pemilihan.
3. Bagi partai politik hendaknya dalam melakukan rekrutmen calon anggota dewan sebagai perwakilannya hendaknya mempertimbangkan dari sisi pengetahuannya.
4. Bagi anggota dewan khususnya komisi yang membidangi keuangan dan sebagai panitia anggaran hendaknya melaksanakan program pemberdayaan bagi para anggota dewan dalam bidang keuangan baik melalui pelatihan, workshop maupun kegiatan lainnya.

REFERENSI:

- Agung, I Gusti Ngurah. 2004. *Statistika : Penerapan Metode Analisis untuk Tabulasi Sempurna dan Tak Sempurna dengan SPSS*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Akbar, Bahrullah. Fungsi Manajemen Keuangan Daerah. *Pemeriksa No. 87*, Oktober 2002.
- Alamsyah, 1997. Mekanisme Pengawasan APBD di Kabupaten Sleman. *Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan*.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.
- Baswir, Revrisond. 1999. *Akuntansi Pemerintah Indonesia*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : BPFE.
- Bharata. 2002. Pengaruh Motivasi terhadap Performance Mahasiswa Akuntan dengan Effort sebagai Variabel Mediasi. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tidak Dipublikasikan*.
- Boediono, Wayan Koster. 2001. *Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Cahyat, Ade. 2004. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten: Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. *Governance Brief. Poverty and Decentralization Project of CIFOR and BMZ. Email : cahyat@cbn.net.id*
- Cohen, Jhon and Peterson. 1999. Administrative Decentralization: A New Framework for Improved Governance, Accountability, and Performance. www.cid.harvard.edu/huid/582.pdf
- Damayanti, Rully. 2004. Analisis Pengaruh Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tidak Dipublikasikan*.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah Dirjen Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah. 1981. *Manual Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
- Djarwanto, P.S dan Subagyo Pangestu. 2000. *Statistik Induktif*. Cetakan ke-4. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar. 1978. *Ekonometrika Dasar*. Edisi terjemah. Jakarta : Erlangga.
- Hair, J. et. all. 1998. *Multivariate Data Analysis with Readings 5th Edition*. New Jersey : Prentice Hall.
- Imawan, Riswandha. 2002. Hak, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPRD. *Makalah Bimbingan Teknis Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD, Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan DPRD Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur*.
- Indriani, Rini. 2002. Pengaruh Pengetahuan dan Rules, Procedures, and Policies (RPPs) terhadap Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Bengkulu). *Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan*.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1998. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- La Palombara, J. 1974. *Politics with in Nation*. Englewood Cliffs : Prentice-Hall Inc.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*.
- Marbun, B.N. 1994. *DPRD: Pertumbuhan, Masalah, dan Masa Depan* (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- . 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi
- . 2001. *Perencanaan Keuangan Publik Sebagai Suatu Tuntutan Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Bersih dan Berwibawa*, Makalah, Jakarta.
- . 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Serial Otonomi Daerah)*. Yogyakarta : Andi.
- Menteri Negara Otonomi Daerah dan Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi UGM. 2000. *Modul Pembekalan Teknis: Manajemen Stratejik dan Teknik Penganggaran/Keuangan Bagi Anggota DPRD dan Pejabat Pemda*.
- Munir, Dasril, dkk. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPI.
- Murni, Sri dan Banu Witono. 2004. Pengaruh *Personal Background dan Political Background* terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Perspektif*, Vol. 9.

- Nugroho, Irwan Tri. Analisis Kandungan Informasi Economic Value Added (EVA) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun 2002 – 2004. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tidak Dipublikasikan.*
- Nunally. 1967. *Psychometric Theory*. New York : McGraw-Hill.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- , Keppres No. 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- , Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bandung : Citra Umbara.
- , Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bandung : Citra Umbara.
- , Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Said, Mas'ud. 2005. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang : UMM Press.
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press.
- Secaran, Uma. 2000. *Research Methods for Business : Skill Bulding Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons Inc.
- Soenarto, 2001. Otonomi Daerah dan Pelayanan Publik. *Bulletin Pengawasan* No. 30 dan 31.
- Soeroso, Bambang P. Memposisikan Rakyat Dalam Otonomi Daerah. *Media Indonesia*, 6 September 2000, hal. 4.
- Sopannah. 2003. Pengaruh partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis Pascasarjana UGM, Tidak Dipublikasikan.*
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sujamto, 1986. *Norma Pengawasan dan Etika Pengawasan Fungsional*. Jakarta : Itjen, Depdagri.
- Sularso, Sri. 2003. *Buku Pelengkap Metode Penelitian Akuntansi: Sebuah Pendekatan Replikasi*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta
- Syahrudin dan Taifur, Werry Darta. 2002. *Peran DPRD Untuk Mencapai Tujuan Desentralisasi dan Perspektif Daerah Tentang Pelaksanaan Desentralisasi (The Role Of The Regional Assembly In Achieving The Objective Of Decentralization and Regional Perspectives In The Implementation Of Decentralization)*. Faculty of Economics Pusat Studi Kependudukan, Universitas Andalas, Regional University Research , On Decentralization in Indonesia, Project 497-0357/204-000, ECG, USAID/Indonesia, Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park.
- Tim. *Makalah Bimbingan Teknis Pendalaman Bidang Tugas Anggota DPRD*. Kerjasama Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM dengan DPRD Kabupaten Sampang Propinsi Jawa Timur.
- Tim Penyusun. 2003. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Surakarta : FE UNS.
- Treisman, Daniel. 2002. *Decentralization and The Quality of Government*. Paper presented at UCLA Conference, 2002. Available at www.polisci.ucla.edu/faculty/treisman.
- Ulum, Ihyaul MD. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : UMM Press.
- Wiratno, Masykur. 2002. *Makalah Workshop Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Pendekatan Kinerja*. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM.
- Witono, Banu. 2003. Optimalisasi Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 2 : 151-168.
- , 2003. Pengaruh *Personal Background* dan *Political Culture* terhadap Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Tesis Program Pasca Sarjana UGM Yogyakarta, Tidak Dipublikasikan.*
- Yudoyono, Bambang. 2000. *Optimalisasi Peran DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Available at www.bangda.depdagri.go.id/jurnal/jendela/jendela3.htm.
- Zuhdi. 2006. Analisis Persepsi Anggota Dewan tentang Pengaruh Reformasi Penyusunan Anggaran terhadap Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada Anggota DPRD Kabupaten/Kota Se-Propinsi Jawa Tengah). *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tidak Dipublikasikan.*